

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Anwas (2014:56) menjelaskan falsafah pemberdayaan sebagai pegangan bagi agen pemberdayaan ketikan memberdayakan masyarakat untuk falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Dimana ada beberapa hal yang mengharuskan agen pemberdayaan bisa ikut serta menelaah apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dengan berbagai potensinya sebagai bentuk dorongan dan motivasi terhadap sasaran pemberdayaan.

Menurut Prasajo (2004) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menghimpun berbagai tahapan strategi dalam proses dan siklus pemberdayaan masyarakat tidak dapat di implementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, pengelolaan, program serta pembiayaan. Dalam kaitannya, Pemberdayaan masyarakat harus di dasari pada berbagai asumsi yang mengikat, bahwa setiap masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus actor utama yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai suatu kebutuhan tersebut. Pemerintah atau pun lembaga yang menyediakan ruang pemberdayaan hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Semua proses dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya harus dilakukan secara individu serta oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga yang memiliki otoritas. Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sebagai objek sekaligus subjek proses dan pemenuhan pemberdayaan.

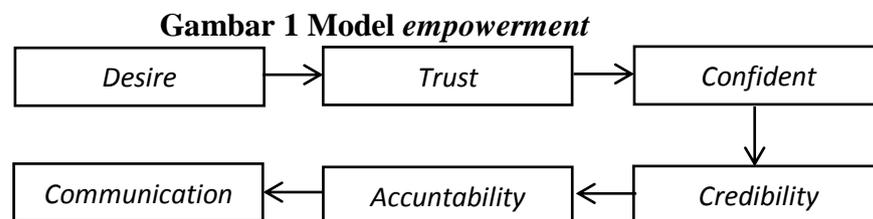
Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pola rancangan dalam tatanan tindakan yang sistematis dan mengutamakan berbagai komponen organisasi formal dan non formal, sebagai upaya menciptakan ruang yang memiliki pemenuhan terhadap masyarakat yang memiliki keinginan untuk berdaya. Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai suatu gerakan (*movement*) dalam menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat dalam peran di tengah-tengah lingkungannya. Untuk itu, diperlukan berbagai kajian dan perancangan program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara

langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) atau Negara. Program dan kegiatan tersebut harus memiliki cara kerja (metode) yang efisien dan efektif untuk memobilisasi potensi dan mengurangi dispotensi yang ada di dalam masyarakat (Prasojo, 2004).

Menurut Suyono (2004) dalam Anwas (2014:85) menggambarkan suatu pola pemenuhan dan pengentasan dari berbagai permasalahan sosial dalam aspek ekonomi perlu adanya suatu tindakan yang dapat meminimalisir permasalahan kemiskinan bergerak dari non ekonomi, melalui beberapa pendekatan pemberdayaan sebagai langkah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kemampuan yang berdaya, berdiri di atas pijakannya sendiri, serta mampu bersaing untuk mampu hidup dalam kemandirian.

a. Tahapan-tahapan pemberdayaan

Menurut Khan dalam Maskuri Bakri (2017) pemberdayaan dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan yang digambarkan dalam sebuah model *empowerment*



Penjelasan mengenai model-model dan tahap-tahapan dalam pemberdayaan pada gambar di atas adalah sebagai berikut:

1) *Desire*

Pemberdayaan tahap pertama adalah *desire* (pendelegasian) yaitu dimana adanya pendelegasian dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk mendelegasikan dan melibatkan masyarakat.

2) *Trust*

Tahap *trust* (membangun kepercayaan) yaitu dimana adanya keinginan dari manajemen dalam hal ini pemerintah untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

3) *Confident*

Tahap ketiga adalah saling percaya yaitu dimana adanya tindakan yang dapat menimbulkan rasa saling percaya diantara pemerintah dan masyarakat dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat.

4) *Credibility*

Tahap keempat adalah *Credibility* yaitu dimana ada keinginan dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk menjaga kredibilitas dengan cara pemberian penghargaan dan pengembangan masyarakat.

5) *Accountability*

Tahap kelima adalah *accountability* yaitu keinginan dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban masyarakat, hal ini sebagai sarana evaluasi terhadap prestasi kerja masyarakat dalam menyelesaikan dan tanggungjawab terhadap wewenang yang diberikan.

6) *Comunication*

Tahap keenam adalah *comunication* yaitu dimana kegiatan dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk mengadakan komunikasi yang saling terbuka untuk menciptakan suatu keadaan yang saling memahami antara masyarakat dan pemerintah.

b. Strategi pemberdayaan masyarakat

Strategi pemberdayaan, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menurut Suyono dalam Oos M. Anwas (2014:89) gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model (laboratorium). Suatu model cenderung harus membuat dulu sebuah model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau sebanyak-banyaknya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto dalam Oos M. Anwas (2014:87) penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan dalam 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
- 2) Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
- 3) Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
- 4) Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.
- 5) Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Paradigma pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat selalu memposisikan masyarakat sebagai aktor utama baik sejak perencanaan maupun sampai proses evaluasi. Secara sederhana masyarakat dapat dikatakan berdaya bila mampu mengidentifikasi permasalahan dan mengatasinya secara mandiri. Mandiri yang dimaksud disini adalah bahwa masyarakat memahami akan suatu tataran hidup bersama (*shared-life*) yang diinginkan dan bekerja dengan sadar secara bersama-sama untuk mencapainya.

Definisi partisipasi warga menurut Zimmerman dan Rappaport dalam Maskuri Bakri (2017:33) adalah keterlibatan dalam aktivitas yang terorganisir dimana individu berpartisipasi tanpa dibayar untuk mencapai suatu tujuan bersama. Adapun menurut Rifkin, et all dalam Maskuri Bakri (2017:33) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai sebuah proses sosial dimana kelompok-kelompok tertentu dengan kebutuhan-kebutuhan bersama yang

tinggal dalam sebuah lingkungan geografis yang sama secara aktif mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, mengambil keputusan dan membangun mekanisme untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

d. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat

1) Tokoh atau pimpinan masyarakat (*Community leader*)

Di sebuah masyarakat apapun baik pedesaan, perkotaan maupun pemukiman elite atau pemukiman kumuh, secara alamiah akan terjadi kristalisasi adanya pimpinan atau tokoh masyarakat. Pimpinan masyarakat seperti (camat, lurah, RT/RW) maupun bersifat informal (ustadz, kepala suku).

2) Organisasi masyarakat (*Community organization*)

Dalam suatu masyarakat selalu ada organisasi-organisasi kemasyarakatan baik formal maupun informal, misalnya PKK, karang taruna, dan sebagainya.

3) Pendanaan masyarakat (*Community fund*)

Bahwa dana sehat telah berkembang di Indonesia sejak lama (tahun 1980-an) pada masa sesudahnya (1990-an) dana sehat ini semakin meluas perkembangannya dan oleh Depkes diperluas dengan nama program JPKM (jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat).

4) Material masyarakat (*Community material*)

Sumber daya alam merupakan salah satu potensi masyarakat. Masing-masing daerah memiliki sumber daya alamnya masing-masing yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan`

5) Pengetahuan masyarakat (*Community knowledge*)

Semua bentuk penyuluhan kepada masyarakat adalah contoh pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan komponen pengetahuan masyarakat.

6) Teknologi masyarakat (*Community technology*)

Dibeberapa komunitas telah tersedia teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan program pelatihan (Nurbeti, M. 2009).

e. Proses pemberdayaan masyarakat

Menurut Toto Mardiko (2019: 125) ada empat proses pemberdayaan masyarakat

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi dan menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi: (a) memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah; (b) identifikasi alternatif pemecah masalah terbaik; (c) identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecah masalah; (d) pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplemtasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian sesama pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
- 4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus dan secara partisipatif. PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuan. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik proses nya maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau dibutuhkan.

2. Pemberdayaan Perempuan

Anwas (2014:149) menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan telah menjalar sejak zaman Hindia-Belanda ditandai dari berbagai pergerakan kaum hawa salah satunya dari Raden Ajeng Kartini memelopori suatu kebangkitan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, hingga berbangsa dan bernegara dikarenakan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti seorang laki-laki.

Menurut Suyono (2010) dalam Anwas (2014:150) mendeskripsikan masih terbatasnya peran perempuan terkait persoalan dengan kemiskinan dalam keluarga di seluruh Indonesia dikarenakan realitas keluarga yang mengandalkan seorang suami saja dalam urusan sumber penghasilan. Bukan tanpa alasan, melainkan minimnya kreatifitas dan keterampilan serta keberanian seorang perempuan memilah waktu dan perannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga perlu adanya suatu pola pemberdayaan pada perempuan dalam rumah tangga, tidak hanya bisa membantu penghasilan suami tetapi bisa mensejajarkan kaum hawa dengan kaum adam hingga bisa melampauinya.

Dalam Ruwaida tentang pemberdayaan menegaskan. Upaya mengatasi kemiskinan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender perlu diarahkan pada akar persoalannya yakni struktur, kondisi sosial, dan kultur masyarakat. Oleh sebab itu, menurut Chafetz, perlu dilakukan penghapusan sistem normatif dan ideologis yang mendasari stratifikasi gender (jenis kelamin). Untuk itu perempuan selayaknya tidak berjarak dengan isu-isu kekuasaan dan politik sebagai arena strategis yang bertujuan melakukan transformasi struktural penguasaan sumberdaya dari struktur ber-ketidakadilan ke struktur berkeadilan (Chafetz, 1988: 7072; Lengermann dan Niebrugge, 2003: 410-411).

Dalam konsepsi Whitmore (1998), pemberdayaan merupakan proses melalui mana kelompok yang diberdayakan mampu berefleksi demi menentukan nasib/kondisinya sendiri (*self determination*). Melalui pemberdayaan, kelompok sasaran atau dampingan dikondisikan mampu atau memiliki kekuatan dalam menentukan tindakan dan mengambil keputusan berkaitan dengan kehidupan mereka. Ada 3 (tiga) kondisi prasyarat, yakni: (1) mengurangi dampak dari

hambatan sosial atau pribadi dalam menerapkan kekuasaan, (2) meningkatkan kapasitas dan percaya diri untuk menggunakan kekuatan, dan (3) memindahkan kekuatan dari lingkungan kepada kelompok itu sendiri. Dalam upaya penguatan posisi tawar ini, Kabeer (2005) juga menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan arena 'kekuasaan', yang membutuhkan kemampuan (*the power within*) dalam melakukan aksi nyata (*power struggle*) untuk mengakses, memanfaatkan, mengontrol, dan bertanggungjawab atas sumberdaya demi perubahan yang diharapkan. Oleh sebab itu, melakukan upaya pemberdayaan tidaklah mudah karena berpilar pada pola relasi yang setara. Kesetaraan relasi ini menurut Cohran dan Henderson (dalam Warren, 1997) mengedepankan rasa saling menghargai diantara berbagai pihak, dan mereka senantiasa melakukan refleksi kritis atas proses dan relasi yang terjalin selama proses pemberdayaan.

Penguatan kapasitas individual sekaligus kolektif melalui pemberdayaan juga ditegaskan oleh Young (1993:158). Menurutnya, perempuan perlu melakukan proses refleksi dan pengambilan keputusan secara kolektif. Kondisi keberdayaan tersebut teridentifikasi dari sejumlah parameter, yakni: citra diri dan percaya diri yang positif, kemampuan berpikir kritis, kohesivitas kelompok, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan melakukan aksi nyata. Secara konseptual, jika Chafetz mengemukakan pemberdayaan merupakan transformasi struktural, maka Kabeer (2005) menawarkan transformasi institusional, yakni proses transformasi yang mensyaratkan adanya gerakan atau perjuangan di berbagai arena 'kekuasaan', yakni: dari individu ke kolektif, dari negosiasi privat ke aksi publik, dari ranah informal ke ranah formal. Gagasan Kabeer bagi sebagian kalangan dianggap sebagai alternatif jawaban, dengan memperhatikan tiga aspek/dimensi yang saling terkait, yakni: *agency*, *resources* dan *achievement*. (Ruwaida, Ida. Pemberdayaan dan Aksi Kolektif Perempuan: Sebuah Refleksi Sosiologis. Staf Pengajar Departemen Sosiologi FISIP UI. Halaman 3-4).

Adanya kendala (*constraint*) bagi perempuan untuk mengakses kredit kecil (*microfinance*) untuk usaha. Banyak laporan yang menyatakan bahwa perempuan sering menjadi *market target* dari rentenir (*moneylenders*), tukang

gadai (*pawnbrokers*), dan penjual barang-barang kebutuhan rumah tangga (seperti: sandang dan peralatan dapur) dengan fasilitas kredit. Usaha untuk menangkap semua indikator kemiskinan yang dicontohkan di atas tentunya bukanlah tanpa tantangan. Tantangan berikutnya yang segera menghadang adalah bagaimana mengukur kemiskinan dan sejauhmana ketersediaan data kemiskinan. Meskipun demikian, studi ini *“should not prevent us from making use of whatever data may be easily available already”* (Sen, 1985:73) dalam Suman dan Agus (2007:64-65)

Saugi, W. & Sumarno. (2015). Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. JPPM, Print ISSN: 2355-1615, Online ISSN: 2477-2992. Halaman 228, “Program pemberdayaan perempuan dusun berupa pelatihan pengolahan bahan pangan lokal dusun yang tidak mengesampingkan proses pendampingan dalam proses pelatihan. Ife & Tesoriero (2008, p.590) menjelaskan bahwa “pelatihan merupakan peran edukatif yang paling spesifik, karena hal tersebut melibatkan bagaimana mengajarkan penduduk untuk melakukan sesuatu”. Pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kualitas hidupnya. Selain dari hal tersebut, dalam pemberdayaan masyarakat tentunya tidak serta merta hanya membuat suatu pelatihan saja, tetapi perlu adanya tindak lanjut yang berupa tindakan nyata secara bertahap dan berkesinambungan setelah pelatihan diberikan. Tindak lanjut akan berjalan lebih efektif jika adanya suatu pendampingan yang berkelanjutan.”

Mulyono & Sungkowo (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Literasi berbasis kewirausahaan Usaha Mandiri Melalui PKBM di Kota Semarang. *Journal of Non Formal Education*, Halaman 59, menggambarkan “Proses pelaksanaan pembelajaran program literasi berbasis kewirausahaan usaha mandiri (KUM) berjalan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada diawali dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan partisipatif, dimana pendekatan ini

cukup fleksibel sesuai dengan kebutuhan warga belajar, potensi lokal, maupun pangsa pasar. Adapun materi pembelajaran selain sesuai dengan potensi lokal dan pangsa pasar juga mengikuti modul yang telah disediakan oleh pemerintah, sedangkan untuk evaluasi dilakukan tahap demi tahap. Kendala dalam program pelatihan ini pada dasarnya tidak ada hal-hal yang krusial, mengingat kendala yang dihadapi hanya terjadinya perubahan waktu pembelajaran. Namun perubahan waktu tersebut dapat diselesaikan antara tutor dan warga belajar dengan cara musyawarah dan mufakat.”

a. Peran Perempuan

Gerakan perempuan dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, sebagai contoh dalam perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan bisa dilihat pada sosok Tjut Nyak Dien, Tjut Mutia, atau Martha Kristina Tiahahu, dan dalam mengisi awal-awal kemerdekaan melalui pendidikan bagi perempuan bisa dilihat pada sosok Nyai Ahmad Dahlan atau Rasuna Said. Perjuangan Tjut Nyak Dien sendiri menimbulkan rasa takjub para pakar sejarah asing, sehingga banyak buku yang melukiskan kehebatan pejuang perempuan ini. Zentgraaf mengatakan, para perempuanlah yang merupakan *de leidster van het verzet* (pemimpin perlawanan terhadap Belanda. Aceh mengenal *Grandes Dames* (perempuan-perempuan besar) yang memegang peranan penting dalam berbagai sektor (Kurniasih, Imas 2008:162) dalam Ahdia, I. (2013:1089).

Afirmatif peran perempuan di Indonesia, kepedulian terhadap eksistensi perempuan adalah dengan adanya instruksi Presiden RI No.9 tahun 2000 tentang “Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional”. Sasaran strategi pengarusutamaan gender (PUG) adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Ahdia, I. (2013:1090)

Strategi Penerapan Model Pemberdayaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Model yang sudah dihasilkan perlu diterapkan agar lebih

berhasilguna dalam rangka penanganan permasalahan kemiskinan tersebut. Adapun yang menjadi ciri khas model adalah: (a) landasan model adalah *ABCCM Empowerment Concept*, (b) pemberdayaan tersebut dilakukan melalui kelompok yang terdiri dari kurang lebih 5 hingga 20 orang anggota, (c) sasaran dan jenis usaha: kelompok fakir: kegiatan yang bersifat penghasilan *harian*, kelompok non fakir: kegiatan dengan sifat penghasilan harian dan bulanan, kelompok miskin: kegiatan dengan sifat penghasilan harian, bulanan dan tahunan, (d) pemberian bantuan didasarkan pada jenis usaha (harian, bulanan atau tahunan) yang dikembangkan dan kedinamisan kelompok (inklusi, aktif dan inovatif), ada pelayanan pendampingan, (e) untuk kelompok fakir ada 20 persen anggota kelompok yang bukan termasuk kategori fakir tetapi kategori miskin sebagai motor penggerak kelompok, (f) tidak ada pengguliran bagi KUBE yang termasuk KUBE kelompok fakir, (g) ada LKM yang dapat mempermudah akses KUBE terhadap kebutuhan modal usaha, (h) keberhasilan diukur dari dua hal yaitu aspek sosial dan ekonomi. (Tampubolon, Joyakin., Ginting Sugihen, Basita., Samet, Margono., Susanto, Djoko., Sumardjo. (2006))

b. Pemberdayaan Perempuan melalui metode pelatihan

Menurut Ife dan Tesoriero (2008:590) menjelaskan tentang pelatihan sebagai satu hal yang berperan dalam proses pembelajaran yang paling spesifik, karena hal tersebut melibatkan bagaimana mengajarkan penduduk untuk melakukan serta belajar sesuatu yang belum terampil atau pun belum mahir untuk bisa dijadikan suatu keterampilan yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraannya (Saugi, Wildan & Sumarno, 2015:228).

Kesejahteraan dalam Depdiknas (2001:1011) menjelaskan tentang kesejahteraan diartikan sebagai sebuah keadaan yang di anggap sebagai suatu keadaan yang baik-baik saja ditinjau dari berbagai aspek kehidupan dimana salah satunya, aman, selamat, dan tentram.

3. Pelatihan keterampilan

a. Pengertian pelatihan

Menurut Simamora dikutip dalam Mustofa Kamil (2010:4) mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Sementara dalam Instruksi Presiden No.15 tahun 1974, pengertian pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.

Goldstein dan Gressner dikutip dalam Mustofa Kamil (1998(2010:4)), memberika definisi pelatihan yang ditekankan pada tempat dilaksanakannya pelatihan. Mereka mendefiiskan pelatihan sebagai usaha sistematis untuk menguasai keterampilan, peraturan, konsep ataupun cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kinerja.

Konsep pelatihan juga diungkapkan oleh Dearden dikutip dalam Mustofa Kamil (1984(2010:7)), yang menyatakan bahwa pelatihan pada dasarnya meliputi proses belajar mengajar dan latihan bertujuan untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu atau efisien kerja. Sebagai hasil pelatihan, peserta diharapkan mampu merespon dengan tepat dan sesuai situasi tertentu.

Kesimpulan dari pengertian menurut para ahli diatas, pelatihan merupakan proses disengaja atau direncanakan, bukan kegiatan yang bersifat kebetulan atau spontan. Pelatihan juga merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar yang dilaksanakan di luar sistem sekolah, memerlukan waktu yang relatif singkat, dan lebih menekankan pada praktik. Pelatihan diselenggarakan baik terkait dengan kebetulan dunia kerja maupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Pada kegiatan pelatihan keterampilan ini dikatakan sebagai kegiatan pendidikan luar sekolah karena kegiatan tersebut dilaksanakan di luar sekolah dan merupakan upaya pendidikan non-formal. Karena dalam kegiatan

pelatihan tersebut masuk dalam 10 patokan pendidikan masyarakat antara lain yaitu:

- 1) Warga belajar dalam kegiatan pelatihan
- 2) Ragi belajar/Motivasi belajar
- 3) Sumber belajar
- 4) Paguyuban kegiatan
- 5) Pamong belajar
- 6) Sarana belajar
- 7) Dana belajar
- 8) Ragi belajar
- 9) Progam kegiatan
- 10) Hasil belajar

b. Tujuan pelatihan

Menurut Moekjat dikutip dalam Mustofa Kamil (1981(2010:11)), mengatakan bahwa tujuan pelatihan adalah untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif dan juga untuk mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerjasama.

Sedangkan menurut Marzuki dikutip dalam Mustofa Kamil (1992:12(2010:11)), ada tiga tujuan pokok yang harus dicapai dengan pelatihan, yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan organisasi.
- 2) Memperoleh pengertian dan pemahaman yang yang lengkap tentang pekerjaan dengan standar dan kecepatan yang telah ditetapkan dan dalam keadaan yang normal serta aman.
- 3) Membantu para pemimpin organisasi.

c. Prinsip-prinsip pelatihan

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam program pelatihan keterampilan pemanfaatan limbah berhasil adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip perbedaan individu

Perbedaan-perbedaan individu dalam latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, minat, bakat, dan kepribadian harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pelatihan

2) Prinsip motivasi

Agar peserta pelatihan belajar dengan giat perlu ada motivasi. Motivasi dapat berupa pekerjaan atau kesempatan berusaha, penghasilan, kenaikan pangkat dan lain-lain.

3) Prinsip belajar

Belajar harus dimulai dari yang mudah menuju kepada yang sulit, atau dari yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui.

4) Prinsip partisipasi aktif

Partisipasi aktif dalam proses pembelajaran pelatihan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta pelatihan.

5) Prinsip keseriusan

Pelatihan jangan dianggap sebagai usaha sampingan yang bisa dilakukan dengan seenaknya.

6) Prinsip kerjasama

Pelatihan dapat berhasil dengan baik melalui kerjasama yang apik antar semua komponen yang terlibat dalam pelatihan.

7) Prinsip metode pelatihan

Terdapat berbagai metode pelatihan, dan tidak ada satupun metode pelatihan yang dapat digunakan untuk semua jenis pelatihan.

4. Pengolahan limbah

Pengelolaan limbah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah. Pernyataan ini biasanya mengacu pada material limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan limbah juga dilakukan untuk pemulihan sumber daya alam. Pengelolaan limbah bisa melibatkan zat padat, cair, gas atau radioaktif dengan metoda dan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Praktek pengelolaan limbah berbeda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dan daerah industri. Pengelolaan limbah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengelolaan limbah.

b. Jenis-jenis limbah

Berdasarkan jenisnya, limbah dapat dibedakan menurut sumbernya, jenis senyawanya, dan wujudnya.

1) Pengerlompokan limbah berdasarkan sumbernya

- Limbah domestik (rumah tangga)

Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan permukiman penduduk (rumah tangga) dan kegiatan usaha.

- Limbah industri

Limbah industri merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri.

- Limbah pertanian

Limbah pertanian berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan.

- Limbah pertambangan

Limbah pertambangan berasal dari kegiatan pertambangan. Jenis limbah yang dihasilkan merupakan material hasil tambang seperti logam dan batuan.

- Limbah pariwisata

Limbah wisata dihasilkan dari sarana transportasi yang membuang limbahnya ke udara, dan adanya tumpahan minyak atau oli yang dibuang oleh kapal atau perahu motor didaerah wisata bahari.

- Limbah medis

Limbah medis merupakan buangan dari suatu aktivitas medis. Limbah medis harus segera diolah setelah dihasilkan atau dapat

disimpan terlebih dahulu jika tidak dapat langsung diolah. Penyimpanan limbah medis tidak boleh tercampur dengan limbah non-medis.

2) Pengelompokan limbah berdasarkan senyawanya:

- Limbah organik

Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup dan bersifat mudah membusuk/terurai.

- Limbah anorganik

Limbah anorganik adalah segala macam limbah yang sifatnya tidak dapat atau sulit terurai.

- Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Limbah B3 merupakan limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

3) Pengelompokan limbah berdasarkan wujudnya:

- Limbah padat

Limbah padat atau bisa disebut sampah merupakan limbah yang berupa barang-barang atau bahan-bahan buangan rumah tangga atau pabrik yang tidak terpakai dalam bentuk padat.

- Limbah cair

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair

- Limbah gas

Limbah gas yang berada di udara terdiri dari macam-macam senyawa kimia. Misalnya karbondioksida, karbonmonoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, asam klorida, amonia, metan dan klorin.

Dari pengertian jenis-jenis limbah di atas, saya mengobservasi tentang pengolahan limbah plastik yang termasuk dalam jenis anorganik. Karena bahayanya limbah plastik yang lama terurai di dalam tanah dan semakin banyak pula

penggunaan limbah plastik pada jaman sekarang. Selain itu juga, limbah plastik bisa digunakan sebagai bahan kerajinan tangan karena limbah plastik memiliki kepadatan yang kuat ketika dibuat menjadi suatu barang sehingga PKBM Ar-Ridho berinisiatif membuat sebuah program pelatihan dengan pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan dasar yang digunakan.

c. Pengolahan limbah

Pengelolaan limbah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah. Pernyataan ini biasanya mengacu pada material limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan limbah juga dilakukan untuk pemulihan sumber daya alam. Pengelolaan limbah bisa melibatkan zat padat, cair, gas atau radioaktif dengan metoda dan khusus untuk masing-masing jenis zat.

d. Cara mengolah limbah plastik menjadi kerajinan cantik

Untuk mengatasi dari penggunaan limbah plastik diperlukan beberapa metode pengelolaan plastik. Pemanfaatan limbah plastik merupakan upaya menekan pembuangan limbah plastik seminimal mungkin dan dalam batas tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan daur ulang limbah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Cara mengolah:

Siapkan bahan dan alat:

- Bungkus minuman instan
- Gunting
- Penggaris
- Jarum dan benang jahit
- Furing/kain polos
- Ritsleting

Cara membuat tas unik dari kemasan plastik minuman instan:

- Siapkan kemasan minuman sachet merek apa saja. Potong bagian atas dan bawah hingga kedua sisi terbuka.

- Cuci semua sampah plastik kemasan sachet tersebut hingga bersih kemudian jemur hingga kering.
- Potong kemasan plastik minuman sachet tersebut hingga menjadi dua bagian yang sama.
- Lipat plastik 1 cm ke dalam pada ujung atas dan bawah hingga lebarnya menjadi 2 cm, lalu buatlah 1.000 lipatan dari 500 bungkus atau sesuai ukuran yang diinginkan.
- Buatlah anyaman pada keempat lipatan hingga membentuk baling-baling
- Selanjutnya gabungkan hasil anyaman baling-baling yang sudah terbentuk satu-persatu dan jangan sampai lupa membuat sudut tegak vertikal agar bisa dianyam ke arah atas.
- Jika tas daur ulang kerajinan plastik sudah terbentuk, selanjutnya buatlah tali tas dengan lipatan yang tersisa membentuk segitiga. Dan gabungkan segitiga yang satu dengan yang lain.
- Setelah tali siap maka jahit pada keranjang tas sesuai letak yang diinginkan. Terakhir, lapiasi bagian dalam tas dengan kain vooring tas. Tambahkan pula resleting pada tas bagian atas.

Itulah salah satu contoh kerajinan yang dibuat oleh para perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan di PKBM Ar-Ridho Kecamatan Indhiang Kota Tasikmalaya.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Judul Skripsi Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat di LKP Yuniza Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian oleh Lilis Karwati 2017 dengan judul penelitian: “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat di LKP Yuniza Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini sama-sama membahas pemberdayaan perempuan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dilakukan dalam program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan pada kelompok

perempuan kurang beruntung melalui pemanfaatan potensi alam setempat yang ada dilingkungan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara hasil yang dicapai dari pemberdayaan perempuan dengan pelatihan kewirausahaan bidang tersebut hakikatnya merupakan satu bangunan menguatkan karena manusia tergantung pada lingkungan. Dampak dari pelaksanaan pemberdayaan dampaknya adalah adanya peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan mereka menjadi memiliki penghasilan serta para warga belajar memiliki pengetahuan dan keterampilan baru yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dan taraf kehidupannya.

2. Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)

Dari SKRIPSI Nika Rizqi Fitriana - 3401412001 Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2016 Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang berlangsung di KUB Serang selangkah lebih maju dibandingkan KUB lain di Desa Pulorejo. KUB Serang tidak hanya memproduksi batik dalam bentuk lembaran saja, akan tetapi KUB Serang sudah berani membuat inovasi produk. Berdasarkan konsep partisipasi, partisipasi hanya sebagai cara program tersebut hanya pada tahap menuju pemberdayaan karena perempuan hanya sebagai objek.
- b. Faktor-faktor pendukung perempuan dalam mengembangkan kelompok usaha bersama (KUB) Serang adalah adanya motivasi perempuan, dukungan keluarga serta dukungan pemerintah yang membuat perempuan semakin antusias menjalankan usaha bersama. Faktor-faktor penghambat adalah kurangnya modal uang dan bahan

baku, serta permintaan pasar yang masih tergantung di wilayah Kabupaten Grobogan.

- c. Anggota perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga setelah memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh, serta memiliki penghasilan rutin setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut analisis longwe program pemberdayaan hanya pada level akses dan kesejahteraan.

3. Judul penelitian Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Sadar Gender Di Kelurahan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Penelitian oleh Listiyaningsih 2015 dengan judul penelitian: “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Sadar Gender Di Kelurahan Wirobrajan Kota Yogyakarta”. Penelitian mendeskripsikan (1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan sadar gender, (2) dampak pendidikan sadar gender bagi perempuan (warga belajar) di kelurahan wirobrajan, (3) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan sadar gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penyelenggara pendidikan sadar gender dilakukan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (2) dampak pelaksanaan pendidikan sadar gender antara lain timbul nya sikap dan kemauan warga belajar untuk berbagi pengetahuan gender kepada orang lain, timbul kepedulian terhadap masalah lingkungan sekitar mengenai permasalahan gender, pergaulan masyarakat menjadi lebih baik, sbab iverta kehidupan keluarganya lebih demokratis, dan lain lain.(3) faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan sadar gender antara lain komitmen dari ketua dengan dibantu sekertaris dalam menjalankan pendidikan sadar gender.

4. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Pelatihan Berwirausaha (Studi pada Kelompok Zahra Prima di Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya)

Dari Skripsi Erna Dede Fujiani – 152103008 Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi.

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan suatu pendampingan wirausaha secara berkelompok yang di prakarsai oleh *local hero* atas dasar dukungan pemerintah karena program PEKKA ialah suatu program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi yang diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat salah satunya kelompok masyarakat Zahra Prima yang salah satu alasan dibentuknya ialah dari dana belajar yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan tersebut sebagai upaya membentuk kelompok perempuan yang harus mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan melalui kelompok usaha.

PEKKA yang ditenggarai oleh Zahra Prima ialah suatu kelompok usaha yang menghimpun berbagai suatu kegiatan pola usaha, diawali dengan adanya sosialisasi hingga pembentukan kelompok usaha dengan menciptakan produk bersama berupa kerudung hingga akhir beberapa anggotanya berani untuk membentuk usaha keluarganya secara mandiri.

5. Judul penelitian Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Menjahit Oleh Koperasi Perempuan Wira Usaha Sejahtera Di Bulak Timur Depok.

Penelitian oleh Minarti 2014 dengan judul penelitian “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Menjahit Oleh Koperasi Perempuan Wira Usaha Sejahtera Di Bulak Timur Depok”. Dalam keterampilan menjahit ini bukan hanya pengetahuan tentang menjahit saja yang mereka dapatkan, akan tetapi juga dapat mempererat ukhuah islamiyah dari segi silaturahmi. Dari hasil pelatihan keterampilan menjahit diharapkan mereka mampu bersaing dengan para pekerja lain dalam dunia kerja. Tanpa menutup kemungkinan mereka dapat membuka usaha rumahan dan merekrut orang lain untuk membantu pekerjaan mereka.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang relevan dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti di atas dengan penelitian yang akan dilakuka yaitu sama-sama meneliti tentang

pemberdayaan. Perbedaannya dari kelima penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu berbeda fokus penelitiannya.

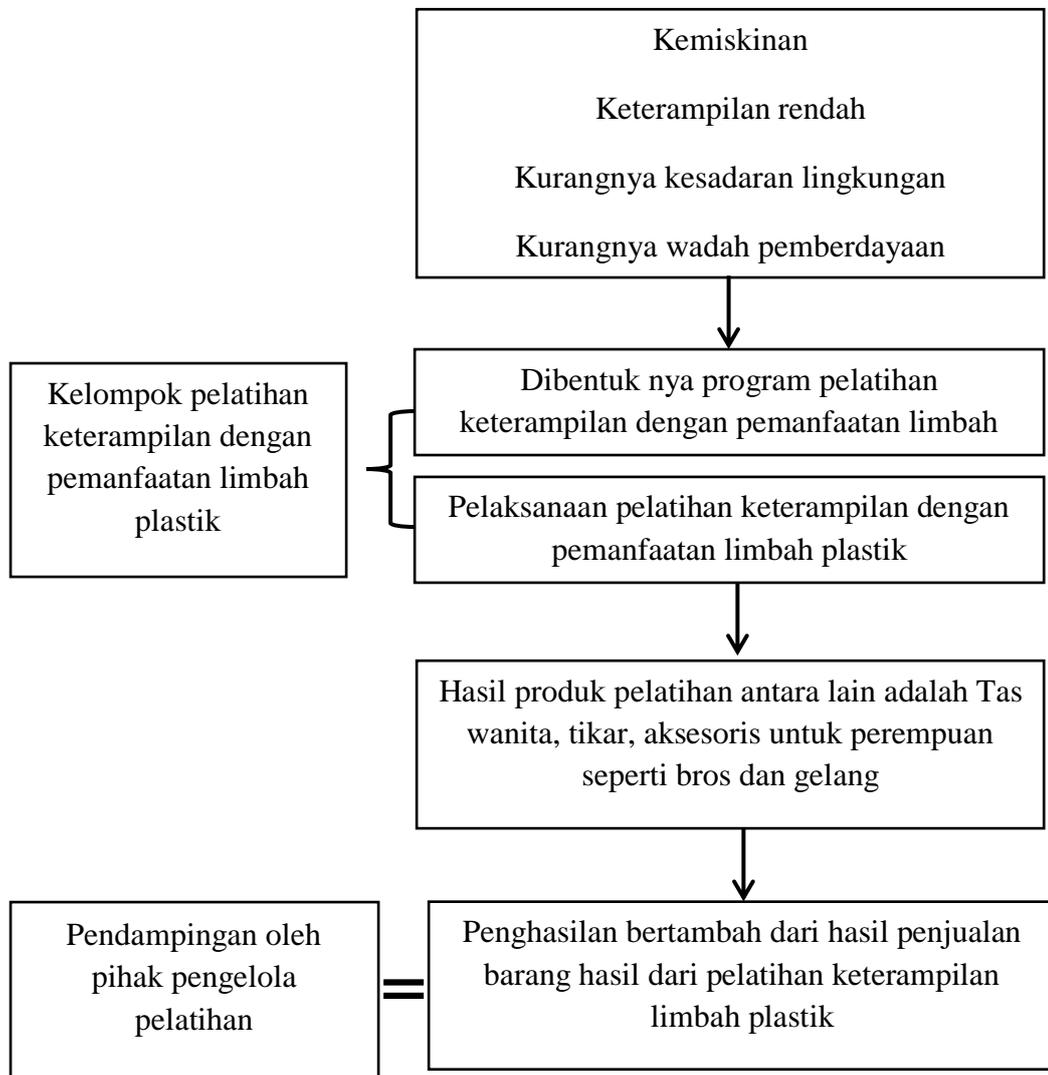
Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya serta belum pernah diteliti orang lain.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir yang diarahkan dalam penelitian ini adalah bahwa masih banyak perempuan di sekitar Lingkungan PKBM Ar-Ridho Kecamatan Indihiang yang kurang memiliki keterampilan disebabkan kurangnya wadah untuk mengembangkan keterampilan. Untuk itu, maka di buatlah program pendidikan keterampilan dengan pemanfaatan bahan limbah yang diharapkan dapat mengembangkan keterampilan perempuan agar dapat ikut aktif dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian.

Pemberdayaan sangat diperlukan bagi masyarakat khususnya untuk kaum perempuan agar bisa hidup mandiri. Salah satu wadah untuk pemberdayaan perempuan adalah melalui pendidikan keterampilan dengan pemanfaatan limbah. Dengan dibentuknya program ini maka dapat menjadi wadah perempuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan, dan wawasannya mengenai keterampilan bahan limbah. Dalam pelaksanaan program ini mempengaruhi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Partisipasi dari semua perempuan sekitar lingkungan PKBM Ar-Ridho juga diperlukan guna keberhasilan dan peningkatan produksi. Adanya program ini juga memberikan peran bagi anggota dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 2.2 Kerangka konseptual



(Sumber peneliti, 2019)